



Rekomendasi Infrastruktur Ditindaklanjuti

BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah menindaklanjuti semua rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terkait dengan proyek infrastruktur 2024 yang sempat menjadi catatan.

Jumali
jumali@harianjogja.com

Meskipun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul tetap membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti LHP BPK.

Alasannya, selain persoalan tidak selesainya pembangunan awal kawasan Agrowisata Bukit Dermo, BPK juga mencatat ada sejumlah pekerjaan proyek fisik

Selain itu, rekanan asal Kota Jogja itu juga telah masuk daftar hitam dan tidak boleh mengikuti proses lelang selama setahun ke depan yang digelar oleh Pemkab. Begitu juga dengan temuan soal kekurangan volume pengerjaan untuk sejumlah proyek juga sudah ditindak lanjuti.

"Semua temuan BPK sudah kami tindak lanjuti. Kan BPK mencocokkan nilai dan segala macam, ada selisih nilai itu kan biasa. Misalnya ada kelebihan bayar, rekanan membayar," ungkapnya, Kamis (6/2).

Akibat adanya beberapa temuan BPK mengenai proyek infrastruktur, saat ini DPRD Bantul pun telah bergerak cepat dengan membuat Pansus LHP BPK. Ada dua Pansus LHP BPK yang terbentuk untuk menindaklanjuti laporan BPK. Ada pansus yang dipimpin Subhan Nawawi dan satu pansus lainnya

Selain itu, rekanan asal Kota Jogja itu juga telah masuk daftar hitam dan tidak boleh mengikuti proses lelang selama setahun ke depan yang digelar oleh Pemkab. Begitu juga dengan temuan soal kekurangan volume pengerjaan untuk sejumlah proyek juga sudah ditindak lanjuti.

"Semua temuan BPK sudah kami tindak lanjuti. Kan BPK mencocokkan nilai dan segala macam, ada selisih nilai itu kan biasa. Misalnya ada kelebihan bayar, rekanan membayar," ungkapnya, Kamis (6/2).

Akibat adanya beberapa temuan BPK mengenai proyek infrastruktur, saat ini DPRD Bantul pun telah bergerak cepat dengan membuat Pansus LHP BPK. Ada dua Pansus LHP BPK yang terbentuk untuk menindaklanjuti laporan BPK. Ada pansus yang dipimpin Subhan Nawawi dan satu pansus lainnya

dipimpin Arif Haryanto.

Perpustakaan Daerah

Anggota Pansus, Herry Fahamsyah, mengaku tidak selesainya pengerjaan Agrowisata Bukit Dermo menjadi catatan paling krusial yang disampaikan oleh BPK. Hal ini berbeda dengan sejumlah temuan dari BPK terhadap sejumlah pengerjaan proyek lainnya yang dinilai tidak signifikan.

"BPK memberikan catatan cukup panjang soal tidak selesainya pengerjaan Agrowisata Bukit Dermo. Lainnya, tidak ada kendala signifikan," kata politikus PAN ini.

Herry, yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, ini mengungkapkan proyek lainnya yang juga menjadi catatan dari BPK adalah pembangunan gedung Perpustakaan Daerah yang anggarannya berasal dari DAK Perpusnas RI senilai

Rp10 miliar.

Dari hasil audit BPK RI, pengerjaan gedung tiga lantai tersebut mengalami keterlambatan pengerjaan. "Telat pekerjaan *landscape* dan juga ada kekurangan volume. Tapi, ini sudah ditindaklanjuti dan selesai," paparnya.

Sementara untuk penyelesaian pengerjaan Agrowisata Bukit Dermo, BPK merekomendasikan adanya enam rencana aksi lanjutan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, saat ini Pansus yang dipimpin oleh Arif Haryanto akan melakukan beberapa langkah. Rencana pansus akan sidak ke lokasi Bukit Dermo pada 14 Februari mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul Saryadi tidak mau berkomentar banyak terkait dengan penyelesaian proyek Agrowisata Bukit Dermo. Ia mengaku akan mengikuti kebijakan yang diambil Pemkab.